

PENGARUH KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) TERHADAP SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (ITPT) DI JAWA BARAT¹

Tuti Ermawati

PENDAHULUAN

Energi merupakan bagian yang sangat vital di dalam menggerakkan roda perekonomian. Kajian yang dilakukan oleh *International Energy Agency* (IEA) dalam buku *World Energy Outlook 2004* memperkirakan kebutuhan energi dunia akan terus meningkat dan di tahun 2030, peningkatan tersebut akan mencapai 60% (Sambodo, 2005). Demikian juga dengan negara-negara berkembang yang akan menyerap 67% dari total peningkatan tersebut (Sambodo, 2005). Dorongan kenaikan permintaan minyak terutama dari negara seperti dari Cina dan India, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Jika diperhatikan sejak tahun 2002 hingga medio 2005 harga minyak dunia sudah meningkat sebesar 180% (Sambodo, 2005).

Sekalipun Indonesia, masuk dalam kategori *medium vulnerable countries* atas gejolak harga minyak dunia sebagaimana disebutkan dalam laporan UNDP (2007), namun sebagai salah satu negara yang juga menerapkan kebijakan subsidi BBM, Indonesia mendapat pukulan telak dari kenaikan harga minyak dunia karena tiga alasan. Pertama, sejak tahun 2002, Indonesia sudah melakukan impor minyak mentah seperti dari Aljazair dan Nigeria. Hal ini terkait dengan tingkat produksi minyak dalam negeri yang mengalami penurunan. Kedua, hingga saat ini pemerintah masih memberikan subsidi BBM. Ketiga, harga minyak dunia diprediksi akan meningkat.

Namun hingga saat ini masih sangat jelas terlihat bahwa kebijakan di sektor energi masih sangat responsif. Bahkan terdapat suatu kecenderungan di masyarakat yang menilai bahwa

pemerintah tidak transparan di dalam melakukan kalkulasi biaya ekonomi atas harga energi. Demikian juga, banyak kalangan yang menilai kenaikan harga BBM sudah keterlaluan, bahkan sebenarnya Indonesia masih mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia. Pemahaman seperti ini sangat mengesankan bahwa kebijakan kenaikan harga energi masih belum berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Studi ini akan mengkaji pengaruh kebijakan harga energi (BBM dan TDL) terhadap dunia usaha yaitu sektor industri menengah dan besar yang tergolong sebagai padat energi. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan akan cara-cara penyesuaian harga energi guna memberikan dampak yang minimal terhadap kegiatan ekonomi di bidang industri.

METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam studi ini sebagian besar lebih menekankan pada pendekatan ekonomi khususnya kebijakan publik, dengan unit analisis kelompok industri yang energi intensif yaitu industri tekstil dan produk tekstil (ITPT). Berdasarkan hasil analisis data statistik industri menengah dan besar tahun 2007 menunjukkan bahwa ITPT masuk dalam kategori BBM intensif yang tinggi, serta dalam konteks konsumsi listrik masuk ke dalam kategori moderat. Adapun untuk wilayah, penelitian ini fokus pada sektor ITPT di Provinsi Jawa Barat mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra industri manufaktur terbesar di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji dua aspek yaitu aspek makro dan mikro. Aspek makro dilakukan untuk melihat secara makro pengaruh kebijakan BBM dan TDL terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) secara nasional, serta seberapa besar kenaikan konsumsi energi berpengaruh terhadap tingkat produksi dan nilai tambah di sektor industri. Untuk menguji hipotesis seberapa besar kenaikan konsumsi

¹ Ringkasan laporan penelitian tahun 2009 dengan judul Pengaruh Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Sektor Industri; tim peneliti terdiri atas Maxensius Tri Sambodo, Latief Adam, Esta Lestari, Purwanto, dan Tuti Ermawati.

energi berpengaruh terhadap tingkat produksi dan nilai tambah di sektor industri, digunakan model logaritma sebagai berikut.

$$Y_{prod} = \pm \ln \hat{a}_1 + \hat{a}_2 \ln X_1 + \hat{a}_3 \ln X_2 + \hat{a}_4 \ln X_3 \quad (1)$$

$$Y_{vad} = \pm \ln \hat{a}_1 + \hat{a}_2 \ln X_1 + \hat{a}_3 \ln X_2 + \hat{a}_4 \ln X_3 \quad (2)$$

di mana,

Y_{prod} adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor industri

Y_{vad} adalah nilai tambah produk yang dihasilkan sektor industri

X_1 adalah total nilai konsumsi minyak, listrik dan gas

X_3 adalah pengeluaran/biaya bahan baku

X_4 adalah pengeluaran/biaya tenaga kerja

Data yang dibutuhkan dalam analisis secara makro adalah data-data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), dan publikasi-publikasi lain yang terkait.

Sementara itu, dalam analisis secara mikro dikaji dampak penyesuaian harga BBM dan TDL pada industri TPT di Jawa Barat. Data yang digunakan data kualitatif yang berasal dari interviu pada 6 perusahaan (termasuk API Jawa Barat) dan kuesioner dari 8 perusahaan sehingga didapatkan total sampel 13 perusahaan.

BBM DAN TDL DI SEKTOR INDUSTRI

Sektor industri selama ini diketahui sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan yang cukup tinggi yaitu 27% terhadap pembentukan GDP pada tahun 2008, dan tingginya penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan yaitu sekitar 7,9 juta tenaga kerja sektor industri pengolahan skala besar dan menengah pada tahun 2005 dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan skala menengah mencapai 4,2 juta dan skala besar mencapai 3,7 juta pekerja. Kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor industri akan menjadi semakin besar apabila ditambahkan kontribusi dari skala usaha kecil dan mikro yang mencapai 77,6 juta (data penyerapan tenaga kerja UMKM di semua sektor ekonomi) pada tahun 2005 (BPS, 2009).

Tingginya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian, membuat sektor ini perlu lebih

didorong perannya di masa yang akan datang. Namun sampai saat ini, sektor industri masih dihadapkan pada banyak tantangan, di antaranya adalah keterbatasan pasokan energi dan listrik yang merupakan komponen *input* penting dalam aktivitas produksi.

Dalam hal penyerapan energi, hasil perhitungan proporsi pengeluaran atau konsumsi energi di sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil (ISIC 171) merupakan satu-satunya industri yang mengonsumsi masing-masing jenis energi tersebut sebesar lebih dari 10% dari total konsumsi di sektor industri. Industri logam dasar dan besi baja (ISIC 271) merupakan salah satu konsumen listrik terbesar dengan proporsi mencapai 12,57% dari total konsumsi listrik dari PLN untuk sektor industri pengolahan. Industri pengolahan bahan makanan (ISIC 151) merupakan konsumen bahan bakar solar terbesar kedua dengan proporsi mencapai 11,93% dan industri kertas dan barang dari kertas (ISIC 210) merupakan konsumen BBM dan oli terbesar kedua dengan proporsi konsumsi mencapai 11,55% dari total konsumsi industri manufaktur nasional.

Berdasarkan data ISIC industri pengolahan 2 digit untuk konsumsi BBM dan listrik juga menunjukkan kecenderungan yang sama dengan kode industri 3 digit. Dari hasil analisis diketahui bahwa industri tekstil (ISIC 17) termasuk dalam golongan industri dengan konsumsi BBM tinggi dan konsumsi listrik dalam golongan moderat. Tidak ada sektor industri pengolahan lainnya yang memiliki besaran konsumsi BBM dan listrik yang lebih tinggi dari industri tekstil tersebut.

Meskipun konsumsi listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Rata-rata laju pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 6,3% antara tahun 2000–2007. Hal yang cukup mengejutkan dalam rentang waktu tersebut adalah bahwa penjualan listrik yang berarti juga konsumsi listrik di sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Bahkan pada 2006, konsumsi listrik di sektor rumah tangga sudah lebih besar dibandingkan dengan sektor industri. Hal ini untuk pertama kali terjadi selama enam tahun terakhir. Perlambatan konsumsi listrik sektor industri dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu: terjadinya perlambatan pertumbuhan *output* dan ekspor sektor industri manufaktur, adanya pengalihan pada sumber energi lain selain energi listrik PT PLN seperti penggunaan batu bara, adanya peningkatan efisiensi ataupun *upgrading* mesin, dan penurunan penggunaan utilitas (lampu, peralatan,

dan lain-lain). Pada sisi lain pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak dari krisis keuangan global juga akan memperlambat pertumbuhan output sektor industri yang akan berdampak pada turunnya konsumsi energi.

Sementara dalam hal kebijakan energi khususnya BBM, diindikasikan adanya ketidakparalelan hubungan di antara pemberian subsidi BBM dan peningkatan produktivitas mereflesikan bahwa subsidi bukan merupakan *tools* yang tepat untuk mendorong produktivitas dan daya saing industri nasional. Sebaliknya, penyediaan subsidi justru membuat sektor industri terlena untuk melakukan langkah-langkah inovatif dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan posisi daya saing mereka baik di pasar domestik ataupun pasar internasional. Seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), jauh tertinggal dari sektor industri di beberapa negara tetangga didalam melakukan restrukturisasi permesinan (Chongbo, 2005; Soesastro dan Basri, 2005). Akibatnya, banyak jenis industri di Indonesia masih menggunakan mesin produksi yang berusia tua dengan produktivitas rendah dan boros BBM. Dalam kaitan dengan penggunaan BBM, secara rata-rata, mesin yang digunakan industri nasional 17% lebih boros dari mesin yang digunakan industri Cina (Kompas, 2007).

Sangat mungkin, kurangnya motivasi industri nasional melakukan restrukturisasi permesinan karena *privilege* bisa menggunakan BBM dengan harga relatif murah. Borosnya sektor industri dalam mengkonsumsi BBM membuat sektor ini menjadi konsumen BBM kedua terbesar di Indonesia setelah sektor transportasi. Namun demikian, konsumsi BBM sektor industri mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2001. Pada periode 2001–2004 dan periode 2004–2007, konsumsi BBM sektor industri mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,4% dan 15,3% per tahun. Karena itu, meskipun tetap sebagai konsumen BBM kedua terbesar, tetapi secara relatif, proporsi konsumsi BBM sektor industri terhadap total konsumsi BBM cenderung menurun (Neraca Industri, DESDM).

Dengan kondisi mesin yang sebagian boros energi, maka tidak lah mengherankan jika konsumsi energi yang tinggi tidak berkorelasi positif dengan nilai tambah industri di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil regresi yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data statistik industri dengan kode ISIC 3 digit sebanyak 63 subsektor industri yang diambil dari data statistik industri besar dan sedang Indonesia 2005 (BPS, 2007), menunjukkan bahwa nilai produksi dan nilai tambah sebagai *proxy* dari kinerja

sektor industri dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ada hubungan yang positif antara perubahan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dengan perubahan nilai produksi dan nilai tambah di sektor industri. Artinya, semakin tinggi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh sektor industri, semakin tinggi pula nilai produksi dan nilai tambah yang dihasilkan. Ini berarti bahwa upaya untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah di sektor industri dapat dilakukan dengan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan tenaga kerja. Konsumsi minyak dan konsumsi listrik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai produksi, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada model perubahan nilai tambah sektor industri.

TEMUAN LAPANGAN

Dalam industri tekstil dan produk tekstil (ITPT), ada dua sumber energi yang sangat di butuhkan yaitu BBM dan listrik. Dibandingkan dengan BBM, listrik merupakan sumber energi yang paling utama dan dibutuhkan oleh setiap subsektor dalam ITPT meski dengan komposisi yang berbeda. Hal ini terkait dengan karakteristik ITPT *upstream* dan *midstream* yang terbilang *energy-intensive* dan *water-intensive* karena penggunaan proses kimiawi yang membutuhkan energi panas sangat besar untuk pemanasan air dan pengeringan.

Begitupun pada ITPT yang terintegrasi di Jawa Barat, penggunaan listrik sebagai sumber energi cukup dominan dibandingkan penggunaan jenis energi lain, di mana proporsi biaya listrik terhadap total biaya produksi rata-rata sekitar 20%. Meskipun demikian, sejak tahun 2005–2008 sebagian besar perusahaan yang diteliti mengalami penurunan konsumsi listrik. Penurunan tersebut terkait dengan masalah besar kelistrikan di Jawa Barat yaitu sisi ketersediaan layanan listrik dan kebijakan tarif. Hingga penelitian ini dilakukan, pemadaman listrik masih kerap kali terjadi di Provinsi Jawa Barat. Bahkan pemadaman kerap kali terjadi tanpa adanya pemberitahuan dari PLN dan kondisi ini sangat merugikan dunia usaha karena akan menambah biaya, turunnya kualitas, dan pengiriman barang tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Dari sisi PLN sebagaimana disampaikan oleh narasumber, pemadaman secara mendadak dapat terjadi karena berbagai faktor, namun penyebab utama adalah terjadinya kekurangan pasokan listrik.

Dari sisi kebijakan tarif listrik untuk industri, pemerintah mengenakan TDL berdasarkan pada perbedaan penggunaan berdasarkan batas daya dan waktunya antara Waktu Beban Puncak (WBP) dan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP). Serta pilihan penggunaan listrik dengan tarif multiguna, yaitu pengenaan tarif yang lebih tinggi dari TDL dengan pasokan yang lebih stabil. Artinya, terjadi diferensiasi harga yang dihadapi oleh industri. Sementara itu, menurut PLN, kebijakan tarif ini ditujukan untuk menyelamatkan kesinambungan pasokan listrik dengan mengajak pelanggan besar dan industri agar menghemat pemakaian listrik pada saat beban puncak.

Mekanisme yang ada dalam rangka menjaga ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat oleh PLN dipandang kalangan industri masih kurang mendukung berkembangnya industri. Selama ini mekanisme pemadaman dan pengalihan listrik dirasakan membawa kerugian bagi industri. Hal ini terkait dengan karakteristik ITPT khususnya di tekstil yang merupakan *continuous-processing*. Pemadaman listrik walaupun hanya sekejap akan merusak proses produksi dan produk akhir. Misalnya, pemadaman pada saat proses *dyeing* (pencelupan) akan memengaruhi warna.

Selain listrik, sumber energi lain yang umum digunakan oleh ITPT di Jawa Barat adalah BBM dengan jenis solar dan minyak bakar (IDO). Solar digunakan oleh perusahaan untuk proses *weaving*, sedangkan IDO untuk proses *dyeing* sebagai bahan bakar mesin *steam* (uap). Secara umum menurut data primer yang didapatkan, penggunaan BBM untuk proses *dyeing* mencapai 20% dari total pengeluaran energi, sedangkan untuk proses *weaving* terbilang rendah antara 2–12%. Perbedaan ini sangat tergantung pada skala produksi, jenis produksi dan pengeluaran energi serta diversifikasinya.

Namun sejalan dengan kenaikan harga BBM, penggunaan solar dan IDO terus mengalami penurunan, penurunan paling tajam umumnya terjadi antara tahun 2005 dan 2006, setelah *shock* harga minyak yang cukup besar, dimana terjadi kenaikan harga hingga dua kali pada tahun 2005. Penurunan konsumsi BBM berkisar antara 30–60%.

Beberapa pengusaha di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa penurunan konsumsi BBM di sektor industri TPT merupakan akibat dari interaksi dua faktor sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM yang kemudian membuat harga komoditas ini bertambah mahal. Misalnya, pada tahun 2001, keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM untuk sektor

industri membuat harga BBM untuk sektor ini menjadi 50% dari harga internasional, dan pada tahun 2002 naik menjadi 75% dari harga internasional (Clements et al., 2007).

Kedua, permintaan pasar terhadap produk industri TPT dalam negeri, khususnya dalam satu tahun terakhir ini, mengalami penurunan. Keadaan ini memaksa sektor industri TPT mengurangi kapasitas produksi. Selain menurunkan konsumsi BBM, keputusan perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksi juga diikuti dengan rasionalisasi tenaga kerja yang kemudian berdampak negatif terhadap penurunan daya beli masyarakat. Pada gilirannya, terjadinya penurunan daya beli masyarakat ini membuat permintaan masyarakat terhadap produk sektor industri TPT semakin menurun. Jadi, ada hubungan positif antara penurunan permintaan produk TPT dan penurunan konsumsi BBM.

Ketiadaan subsidi BBM bagi sektor industri tentunya bukan suatu hal yang membuat sektor industri mengalami penurunan aktivitas usaha. Justru perlakuan ini membuat sektor industri semakin kreatif dalam menyiasati kondisi yang ada dengan cara memanfaatkan sumber energi alternatif seperti batu bara dan juga gas bagi peningkatan produksinya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan intensitas produksi akan membutuhkan energi yang lebih besar. Apabila biaya konsumsi energi dapat diminimalkan, maka biaya produksi juga akan dapat ditekan pada tingkat yang terendah sehingga akan menghasilkan produk dengan biaya rendah dan dapat dijual pada tingkat harga yang kompetitif.

Batu bara banyak digunakan oleh industri TPT karena harga batu bara yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga listrik per kwh yang dibebankan pada industri. Berdasarkan wawancara di lapangan terhadap beberapa industri TPT, ternyata dengan pengalihan pada mesin *steam* batu bara mampu menghemat listrik hingga 60%. Namun demikian, bukan berarti penggunaan batu bara tanpa ada masalah. Beberapa kendala dalam menggunakan di antaranya adalah keberlangsungan pasokan batu bara kerap tersendat terutama pada musim hujan, rendahnya kualitas batu bara/kalori batu bara rendah sehingga dalam proses pembakarannya masih harus dicampur dengan bensin, serta semakin tingginya harga batu bara.

Menurut Sekjen API, keterbatasan stok batu bara dengan kalori tinggi terjadi akibat perusahaan pertambangan lebih banyak memilih ekspor ketimbang memasok batu bara ke industri dalam

negeri karena mereka mempunyai kontrak dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri akibat adanya disparitas yang cukup tinggi antara harga batu bara di dalam negeri dan di luar negeri sehingga banyak perusahaan tambang batu bara yang lebih memilih ekspor. Sementara itu, industri domestik justru kekurangan pasokan, seperti yang terjadi pada industri TPT di Jawa Barat pada awal tahun 2008.

Kondisi ini sebenarnya dapat dihindari apabila pemerintah tegas dalam hal tata niaga sehingga program wajib pasok ke dalam negeri (*domestic market obligation*/DMO) yang dicanangkan oleh pemerintah dapat segera diberlakukan. Setidaknya perusahaan pertambangan wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga kebutuhan industri terutama tekstil tercukupi. Selain itu, pemerintah juga harus mengatur para broker karena jika tidak diatur akan makin menyuburkan praktek pertambangan liar karena selama ini para broker umumnya membeli batu bara dari para penambang liar.

Selain masalah pasokan, hal yang dikhawatirkan oleh industri TPT pengguna batu bara adalah masalah lingkungan. Pada umumnya limbah industri menurut PP No. 18 Tahun 1999 oleh pemerintah dikategorikan sebagai limbah B3 yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Begitupun dengan limbah batu bara yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai limbah B3 sehingga proses pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahannya memerlukan perlakuan khusus. Kondisi ini membutuhkan penyelesaian secara bersama antara pemerintah dan dunia usaha, mengingat volume limbah yang semakin meningkat.

Selain penggunaan batu bara, kenaikan harga energi mendorong perusahaan TPT melakukan penyesuaian waktu penggunaan listrik dari WBP ke LWB, melakukan penggantian mesin yang lebih baru dan penggunaan alat hemat listrik yang banyak dijual terutama inverter, serta melakukan strategi produksi dan pemasaran dengan menyesuaikan kuantitas dan kualitas produk terhadap total biaya. Respons ini dapat dilakukan dengan menurunkan kuantitas produksi atau memproduksi pada kuantitas yang sama dengan harga akhir yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas produk bisa disesuaikan untuk menjaga harga pada biaya produksi yang sama. Penurunan produksi bisa mencapai 30%.

Perubahan komposisi produksi dilakukan dengan mengubah faktor tenaga kerja dan *input* produksi. Efisiensi *input* produksi atau bahan baku mencapai 5%. Pemangkasan jam kerja dapat

menghemat sekitar 5–16%, sementara untuk penggunaan gas, jarang perusahaan yang menggunakannya. Hal ini terutama disebabkan ketersediaannya yang masih terbatas. Bahkan penggunaan gas masih sulit untuk diimplementasikan karena investasi infrastruktur perpipaan yang mahal dan sustainabilitas suplai yang tidak terjamin.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

BBM dan TDL merupakan komponen yang penting dalam proses produksi ITPT sehingga kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan harga BBM serta kebijakan tarif TDL membuat banyak ITPT melakukan penyesuaian, diantaranya adalah mengurangi konsumsi BBM dan TDL dan mengalihkannya dengan penggunaan batu bara, merestrukturisasi mesin dengan yang lebih muda, serta melakukan perubahan komposisi produksi.

Guna meminimalkan dampak atas kenaikan harga BBM dan TDL ataupun pelemahan ekonomi dunia, pemerintah dapat menjalankan kebijakan subsidi energi dengan mempertimbangkan kelompok/target industri yang cukup strategis, paling tidak yang memiliki kontribusi besar dalam hal membuka kesempatan kerja, memiliki keterkaitan yang erat dengan industri lokal, dan lain-lain.

Mengatasi krisis listrik dari sisi penawaran perlu mendapatkan prioritas lebih besar dibandingkan dengan sisi permintaan. Lambatnya pertumbuhan kapasitas pembangkit perlu dicari jalan keluar secepatnya. Dalam hal ini pemerintah perlu lebih berani untuk membuka sektor pembangkitan sebesar-besarnya kepada pihak swasta dengan memberikan insentif yang menarik, misalnya dalam hal perpajakan dan tingkat harga jual kepada PLN. Demikian pula, saat ini disparitas harga yang besar antara tingkat harga *input* primer seperti batu bara dan gas dengan harga ekspor membuat pasokan *input* primer bagi pembangkit listrik mengalami gangguan pasokan. Menyikapi kondisi ini pemerintah perlu bertindak tegas dengan menyiapkan penampung-penampung yang memadai untuk menyimpan bagi hasil dari kedua komoditas tersebut.

Pemerintah perlu merekonstruksi kebijakan energi nasional terkait dengan seluruh aspek. Energi kerap dianggap sebagai bahan bakar pertumbuhan ekonomi, karena energi menggerakkan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan energi yang konstruktif namun tidak generik bagi setiap sektor, baik masyarakat, industri,

maupun transportasi. Khusus bagi ITPT, ketersediaan energi merupakan harga mutlak, sehingga kebijakan energi yang ada saat ini perlu dikaji kembali. Kebijakan energi yang dimaksud mencakup ketersediaan energi yang memadai, baik listrik maupun batu bara untuk kebutuhan domestik, dengan harga keekonomian yang rasional sehingga mampu mendorong ITPT nasional. Selain itu, kebijakan lanjutannya, khususnya terkait dengan aspek lingkungan hidup perlu dikembangkan, tidak saja mencakup peraturan yang *counterproductive*, tapi justru membangun industri turunan pemanfaatan dan pengolahan limbah sehingga tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang mencemarkan lingkungan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan perizinan (perda) yang membawa konsekuensi pada meningkatnya biaya ekonomi tinggi perlu ditinjau kembali, dan dialihkan pada kebijakan yang membawa peningkatan iklim usaha.

Tingkat harga listrik di Indonesia relatif paling murah dibandingkan dengan negara lainnya, namun demikian faktor harga belum menjadi jaminan. Sebagaimana diketahui, cukup banyak kebijakan non-harga berdampak besar terhadap kenaikan biaya listrik, seperti beban puncak, pajak penerangan jalan, dan faktor pengali. Jika komponen tersebut dijumlahkan dalam biaya listrik, maka penghitungan harga listrik di Indonesia sebetulnya cukup rumit. Dalam hal ini, PLN perlu mempertimbangkan upaya penyederhanaan sistem pentarifan, sehingga sektor swasta akan dengan mudah melakukan kalkulasi biaya listrik. Hal penting yang perlu dipikirkan adalah perlunya peninjauan kembali faktor K yang menjadi faktor disinsentif bagi pelanggan industri.

Selain hal tersebut di atas, pemerintah perlu secara cermat menerapkan standar kinerja bagi lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan energi BBM dan listrik. Dengan demikian, tindakan melakukan *transfer pricing* dalam bentuk inefisiensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. dan Sambodo, M.T. 2008. "Analisis Kinerja Beberapa Industri", dalam Sambodo et al., (Ed.) *Mengurai Benang Kusut Daya Saing Indonesia*. Jakarta: LIPI Press. Pp. 127-145.
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). 2009. "Indonesian Textile & Textile Product". Bahan Presentasi Focus Group Discussion P2E-LIPI, Unpublished.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Industri 2007*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Statistik Industri Besar dan Sedang 2005*, Volume 1. Jakarta: BPS.
- Clements, B., Jung, H., dan Gupta, S. 2007. "Real and Distributive Effect of Petroleum Price Liberalization: the Case of Indonesia". *Developing Economies*, 45 (2): 220-237.
- Chongbo, W. 2005. "Indonesian Textile and Garment Industry: Challenges and Prospects", *Indonesian Quarterly*, 33 (3): 208-215.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2008. *Handbook of Energy & Economics Statistic of Indonesia*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2008. *Rencana umum ketenagalistrikan Nasional 2008 s.d. 2027*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2007. Peranan Teknologi dan Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batu bara yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional." Prosiding Kolokium Pertambangan 2007, Bandung.
- Gujarati, D.M. 2005. *Basic Econometrics*, Fouth Edition. New York: McGrawHill.
- Lestari, E., Adam, L., Sambodo, M.T., Purwanto, dan Ermawati, T. 2007. *Pengaruh Kebijakan Harga Energi terhadap Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat: Dampak Kenaikan Harga BBM*. LIPI: Pusat Penelitian Ekonomi (P2E).
- Sambodo, M.T., (Ed.). 2007. *Mengurai Benang Kusut Daya Saing Perekonomian Indonesia*, Pusat Penelitian Ekonomi. Jakarta: LIPI.
- Sambodo, MT. 2008. *Model Dan Strategi Peningkatan Daya Saing Industry Nasional*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- World Bank. 2004. *Raising Investment in Indonesia a Second Generation of Reforms*. Washington DC: World Bank.

